

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah:: Semu atau Nyata. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 21, No. 2.
- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Indonesian Local Government's Accountability and Performance: The Isomorphism Institutional Perspective. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 19, No. 1.
- Akbar, R. (2011). Performance Measurement and Accountability in Indonesian Local Government. Ph.D dissertation, Curtin University.
- Akbar, R., Pilcher, R. A., & Perrin, B. (2015). Implementing Performance Measurement System: Indonesian Local Government Under Pressure. *Qualitative Research in Accounting and Management*, Vol. 12, No. 1
- Baskoro, F. R., & Akbar, R. (2018). Mengevaluasi Sistem Pengukuran Kinerja di Instansi Publik: Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol 1 No 2*.
- Cavalluzzo, K. S., & Ittner, C. D. (2004). Implementing Performance Measurement Innovation: evidence from government. *Accounting, Organizations and Society*, 243-247.
- Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4 th. ed. *SAGE Publications*.
- Deasari, N. (2019). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Pada Pemerintah Kota Bontang. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, Vol. 48, No. 2.
- Friedman, Mark (2005). Trying Hard Is Not Good Enough. *FPSI Publishing*.
- Hamid, S. M., Hamali, J. B., & Abdullah, F. (2015). Performance Measurement for Local Authorities in Sarawak. *6th International Research Symposium in Service Management*.
- Hennink, M., Hutter, I., dan Bailey, A., 2011. Qualitative Research Methods. SAGE Publications
- Huque, A. S. (2011). Accountability and governance: strengthening extra-bureaucratic mechanism in Bangladesh. *International Journal of Productivity and Performance Management*, Vol. 60(Iss 1).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Bappeda dan Inspektorat Kabupaten Temanggung)**

BRIGITTA CLARABELLA, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

- Jaaskelainen, A., & Laihonen, H. (2014). A Strategy Framework For Performance Measurement in the Public Sector. *Public Money and Management*.
- Kloot, L. (1999). Performance Measurement and Accountability in Victorian Local Government. *The International Journal Of Public Sector Management*, Vol. 12 No. 7, 1999.
- Kluvers, R. (2003). Accountability for Performance in Local Government. *Australian Journal of Public Administration*, 57-69.
- Krisanti, N. P. (2015). Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Kurniawan, D. (2019). Pengembangan Indikator Kinerja Pada Organisasi Publik (Studi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mariandini, F. I., Irianto, G., & Nurkholis, d. (2018). Institusionalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Economia*, Vol. 14, No. 1.
- Meyliana, Agustina, L., & Setiawan, C. (2018). Analisis Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, Vol.10, No.2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Raharja, E. L. (2018). Strategi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor.
- Rahmadoni, F., & Erwandi. (2018). Evaluasi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Hasil. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang*, Vol. 4, No.1.
- Rahmat, M., & Akbar, R. (2017). Evaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Studi Pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Tambora*, Vol 2, No.1.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Bappeda dan Inspektorat Kabupaten Temanggung)**

BRIGITTA CLARABELLA, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.

Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

- Ridha, M. A., & Basuki, H. (2012). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
- Ruscitasari, Z. (2019). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Akmenika*, Vol.16 No.2.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 2.
- Sevi, Z. (2005). Measuring Performance On a Local Government Level in a Transitional Country: the case of Serbia. *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 18(7).
- Sinclair, A. (1995). The Chameleon of Accountability: Forms and Discourses. *Accounting, Organizational and Society*, Vol. 20, No. 2/3, 219-237.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Isomorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2).
- Sofyani, H., Akbar, R., & Ferrer, R. C. (2018). 20 Years of Performance Measurement System (PMS) Implementation in Indonesian Local Governments: Why is Their Performance Still Poor. *Asian Journal of Business and Accounting* .
- Wahyunurani, V., Sudarma, M., & Hariadi, B. (2017). Institusionalisasi Reformasi Birokrasi (Studi Kasus pada Badan Pusat Statistik. *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 4, No. 1.